e-news letter
JAN I 2020
PKSPARLEMEN
KREATIF, ATRAKTIF TANTIF
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Jadikan Musibah Banjir Sebagai Momen PERSATUAN

Tetap Berkhidmat, di Saat Bencana

Jika dulu saja tanpa pemilu dan partai biasa masuk ke jeram banjir, mengapa kini saat amanah besar dititipkan oleh rakyat, lalu punya laku lampah yang berpaling dari itu semua.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Banjir besar awal tahun 2020 mungkin bukan yang pertama dan bisa jadi bukan yang terakhir. Ada yang bilang ini siklus alam lima tahunan. Mirip periode sistem pemilu kita yang susah ditebak dan penuh tragedi. Padahal sebagai daerah *ring of fire*, sudah sepantasnya kesiapan dan management terhadap bencana menjadi hal yang mutlak disadari oleh semua pihak.

Bagi PKS bencana merupakan sarana untuk berkhidmat dan memberi pelayanan terbaik bagi publik. Namun niat dan langkah baik tidak selamanya dipandang baik, lazim saja dalam dunia yang bundar ini. Sebagian pihak memandang PKS hadir di tengah banjir dengan "Teknik kampanye usang" atau "old style campaign". Bahkan ada yang lebih pahit ditelah ludah dan perih didengar telinga: "pencitraan", cari "sensasi", "sok peduli", "ikhlas kok pake bendera partai" dan sebagainya. Kira-kira apakah arang patah ditempa api? surut ke pantai saat layar sudah terkembang? Tidak.

Proses demarketing terhadap partai politik dalam sistem politik transaksional terus terjadi, meski dibanyak text book sebagai salah satu pilar demokrasi yang penting. namun perannya terus di bully dan dianggap tidak penting. Mengapa jika Partai Politik membantu rakyat disaat bencana sering disalahpahami, tidak seperti korporasi. Padahal bisa jadi yang dibawa sama, jumlahnya sama, dan titik lokasinya pun sama. Bisa jadi motif ekonomi lebih dominan korporasi dibandingkan partai politik. Lebib menukik lagi, mengapa PKS tetap setia melakukan strategi pemasaran sosial (social marketing) seperti itu? apa faedah dan dimana ahlaknya.

Tentu setiap langkah punya alasan, jujur saja kami tak kuasa untuk berdiam diri saat bencana datang. Jika dulu saja tanpa pemilu dan partai biasa masuk ke jeram banjir. Memikul nasi bungkus yang tersingkap air. Mengantar asa dalam basah dan dingin bagi yang sedang menanti. Lalu mengapa kini saat amanah besar dititipkan oleh rakyat, lalu punya laku lampah yang berpaling dari itu semua. Jujur kami malu. Biarlah malu karena cibiran kami simpan disaku celana basah, daripada berdiam diri dirumah dan menonton dari balik layar TV saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana. Semua ini tentang harga diri, bukan citra diri, reputasi atau sekedar mengejar suara dipemilu nanti.

Jika itu yang dicari, sudah lupa berapa banyak kami kecewa. Jika itu yang dipinta, entah sudah berapa banyak energi yang terkuras karena tak berbuah suara. Satu kali lagi: Ini tentang Harga diri. Menjadi yang peduli atau mati empati. Bismillah saja jika lembing sudah dilempar, tinggal ikhtiar dan tawakal.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengintruksikan seluruh Anggota legislatif asal PKS dari pusat hingga daerah untuk bahu membahu turun tangan membantu warga yang terkena musibah Banjir di beberapa daerah.

Alhamdulillah sejak hari pertama sejumlah Aleg PKS telah turun ke lokasi bencana. Mereka menjadi bagian terdepan dan tidak terpisahkan dalam proses pemulihan pasca bencana. Peristiwa saat ini menjadi peluang khidmat bagi PKS memberi yang terbaik kepada rakyat. Doakan dan dukung kami istiqomah menghadirkan kebaikan.

Bismillah

Humas Fraksi PKS
DPR RI

Ini semua musibah. Ujian dari Allah. Saatnya kita bergandengan tangan menolong saudara-saudara kita yang jadi korban. dan bantuan ini tak seberapa dibandingkan dengan penderitaan warga. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit meringankan

H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

Jazuli Juwaini Minta Legislatif Fraksi PKS Pusat-Daerah Turun Bantu Korban Banjir

Tunjukkan keprihatinan dan dukungan agar banjir ini dapat segera diatasi dengan cepat dan tuntas serta tidak banyak korban jiwa. Mari saling bantu saudara kita yang tertimpa musibah. Kader-kader PKS di berbagai wilayah musibah insya Allah langsung terjun menjadi relawan, memberikan bantuan langsung, dan kantor-kantor PKS telah siaga menjadi posko bantuan dan penanganan bencana

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (02/01) — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan keprihatinan mendalam atas musibah banjir yang menimpa beberapa daerah khususnya di Jakarta, Jawa Barat, Banten dan di wilayah-wilayah lain.

Untuk itu, secara khusus Jazuli Juwaini menginstruksikan seluruh anggota legislatif Fraksi PKS dari pusat sampai daerah untuk bahu membahu turun tangan membantu warga yang terkena musibah banjir tersebut.

"Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS kami sampaikan keprihatian mendalam kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah banjir. Kita semua berharap dan berdoa agar banjir segera surut, tidak banyak korban jiwa, dan masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Kami instruksikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat dan daerah untuk bahu membahu membantu korban banjir semaksimal mungkin," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima, Kamis (2/1/2020).

Sebagai langkah kongkrit Jazuli menginstruksikan untuk menggalang dana bantuan yang disisihkan dari sebagian gaji anggota dewan PKS dan berharap mudah-mudahan ikhtiar ini bisa meringankan korban banjir.

Anggota DPR Dapil Banten ini meminta kepada pemerintah baik daerah maupun pusat dengan seluruh jajaran khususnya badan penggulangan bencana (BPBD dan BPNPB) bertindak siaga, sigap, cepat, dan tuntas dalam mengevakuasi warga serta menyiapkan tempat penamoungan dan kebutuhan bagi korban yang layak.

Jazuli juga meminta para petugas efektif mengatasi banjir dan dampaknya.

"Pemerintah daerah dan pusat harus ambil tanggung jawab dan siaga penuh. Prioritas utama menyelamatkan warga ke tempat yang aman banjir. Menyiapkan tempat penampungan sementara dan segala kebutuhan yang diperlukan. Serta efektif dalam mengatasi air banjir sehingga cepat surut dan dapat mengurangi dampak bencana," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini juga berharap kepada seluruh masyarakat dimanapun berada untuk tetap waspada dan berhati-hati karena curah hujan yang tinggi dan terus turun.

Kepada seluruh masyarakat, ia mengajak untuk mendukung aktivitas tanggap bencana dengan menunjukkan solidaritas doa, bantuan materi, atau terjun langsung membantu menjadi relawan bencana.

Dia juga berpesan, tidak perlu mengutuki atau saling menyalahkan atas bencana yang terjadi.

Sebaliknya, tunjukkan keprihatinan dan dukungan agar banjir ini dapat segera diatasi dengan cepat dan tuntas serta tidak banyak korban jiwa.

"Mari saling bantu membantu saudara kita yang tertimpa musibah. Kader-kader PKS di berbagai wilayah musibah insya Allah langsung terjun menjadi relawan, memberikan bantuan langsung, dan kantor-kantor PKS telah siaga menjadi posko bantuan dan penanganan bencana," kata Jazuli.

BANJIR JADEBOTABEK

HNW: Jadikan Musibah Banjir Sebagai Momen Persatuan

> Saya minta seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam memberikan bantuan dengan apapun yang kita bisa, baik itu tenaga, dana, doa, dan potensi apapun yang dimiliki"
>
> **Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI II

Jakarta (4/1) --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid mengimbau musibah banjir yang melanda Jabodetabek agar menjadi momen persatuan. Setiap warga harus berlomba atasi masalah, bukan justru menebar fitnah karena fitnah tidak selesaikan masalah. Menurutnya, momen banjir adalah momen perekat ukhuwah.

"Banjir di tahun baru 2020, penting dimaknai untuk hadirkan semangat baru, yakni semangat persatuan. Satukan kembali warga Indonesia karena kita semua adalah sebangsa dan senegara", tegasnya di sela-sela membantu korban banjir di Kemang, Jakarta Selatan (2/1).

Hidayat meminta seluruh badan Pemerintah untuk bekerjasama dengan baik dan melaksanakan kewajibannya mengatasi banjir serta masalah-masalah turunannya. Selain itu Seluruh lembaga zakat, masjid-masjid, LSM, NGO, dan warga yang tidak terdampak banjir harus aktif memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir.

"Saya minta seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam memberikan bantuan dengan apapun yang kita bisa, baik itu tenaga, dana, doa, dan potensi apapun yang dimiliki", ujarnya.

Hidayat sendiri telah mengunjungi korban banjir di beberapa titik di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan serta memberikan bantuan berupa sembako, pakaian, dan makanan siap santap.

"Saya sudah mengunjungi beberapa lokasi dan masyarakat senang dengan kehadiran kita. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah makanan dan pakaian", ujarnya.

Banjir Jabodetabek, Mufida: Kesehatan Korban Banjir Perlu Diperhatikan

Aparat di lapangan bisa bekerjasama degan tenaga medis dari berbagai lembaga kemanusiaan dan relawan kesehatan yang juga terjun ke lokasi banjir. Pemerintah pusat harus ikut andil dan bekerjasama dengan Pemda Provinsi dalam mencegah terjadinya korban sakit dari musibah banjir kali ini

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M.Si.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI 2

Jakarta (02/01) --- Hujan deras yang melanda wilayah jabodetabek sejak selasa siang menyebabkan terjadinya banjir yang menimpa sebagian besar wilayah Jakarta dan beberapa bagian wilayah di Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi pada Rabu, 01/01/2020.

Cukup banyak penduduk korban banjir yang mengungsi di posko-posko pengungsian, sekolah maupun mesjid.

Anggota Komisi IX DPR dari Dapil Jakarta Pusat-Selatan dan Luar Negeri, Kurniasih Mufidayati, mendatangi dan memberikan bantuan bagi korban banjir di beberapa lokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Saat mengunjungi lokasi banjir di tiga titik yaitu Petogogogan, Jatipadang, Pondok Pinang dan Ulujami di Jakarta Selatan serta Cempaka Baru di Jakarta Pusat, Kurniasih menyaksikan beberapa korban banjir yang berada dalam kondisi rentan dalam pengungsian.

"Beberapa kelompok yang rentan gangguan kesehatan adalah sepertu ibu hamil, bayi dan batita, juga manula di pengungsian. Mereka kedinginan karena cuaca yang terus gerimis dan mendung serta tempat pengungsian yang serba terbatas", ungkap Mufida.

Mufida mengapresiasi kecepatan Gubernur DKI Jakarta dalam menangani musibah banjir di ibukota.

"Seruan kepada seluruh jajaran Pemda di semua level untuk segera turun memberikan bantuan banjir direspon cukup positif oleh semua birokrat, khususnya para Lurah dan jajarannya", tuturnya.

Dalam rangka membantu Gubernur DKI Jakarta, Kurniasih melakukan koordinasi dengan pak Lurah di lokasi yang dikunjungi.

Anggota DPR RI yang membidangi masalah kesehatan ini, meminta agar para korban banjir di pengungsian yang rentan ini mendapat perhatian khusus untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan preventif dan cepat.

"kondisi kesehatan para pengungsi juga perlu mendapatkan perhatian, karena bagaimanapun tinggal di pengungsian memiliki banyak keterbatasan, kondisi yang seadanya, berkumpulnya banyak orang di satu lokasi yang menyebabkan rawan tertular penyakit," ungkapnya.

Oleh karenanya, Mufida meminta agar di setiap posko pengungsian tersedia tenaga

medis untuk memantau kondisi kesehatan pengungsi dan menangani pengungsi yang sakit, dengan obat-obatan yang cukup.

"Aparat di lapangan bisa bekerjasama degan tenaga medis dari berbagai lembaga kemanusiaan dan relawan kesehatan yang juga terjun ke lokasi banjir. Pemerintah pusat harus ikut andil dan bekerjasama dengan Pemda Provinsi dalam mencegah terjadinya korban sakit dari musibah banjir kali ini", kata Mufida

Selain meninjau langsung, Kurniasih dan Pusat Khidmat PKS setempat, juga memberikan bantuan dalam bentuk makanan siap saji dan bahan makanan instan yang mudah dimasak untuk para pemgungsi, serta membuat pojok bubur corner yang menyediakan berbagai jenis bubur untuk pengungsi khususnya bayi, balita dan manula.

"Selain itu, bagi para pengemudi ojek dan gerobak motor yang sepeda motornya rusak akibat banjir diberikan layanan servis motor gratis. Bantuan ini diberikan untuk membantu agar masyarakat bisa terus beraktifitas dan mencari nafkah pasca banjir dengan sepeda motornya", paparnya.

Mufida pun mendoakan semoga Allah segera mengangkat musibah, khususnya bagi para korban banjir. Aamiin

BANJIR JADEBOTABEK

Anis Apresiasi Kesetiakawanan dan Kesigapan Kader PKS

“Kita juga berterima kasih kepada para donatur, dermawan dan relawan PKS. Semoga para pengungsi bisa terurus dengan baik. Ada juga yang mengantar bamtuan sendiri ke lokasi para korban banjir. Ini bukti kesetiakawanan warga Jakarta Timur yang luar biasa

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag. M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI I

Jakarta (01/01) — Banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta khususnya wilayah Jakarta Timur, mendapat perhatian khusus dari anggota DPR RI fraksi PKS dapil Jakarta Timur, Anis Byarwati.

Sebelum 12 jam banjir menggenangi wilayah Jakarta, tim relawan Anis segera turun menyambangi posko-posko banjir yang di dirikan oleh struktur DPC dan DPRa PKS.

"Pada pagi hari, anggota tim Anis sudah turun membagikan makanan untuk sarapan berupa nasi bungkus dan roti isi di daerah Cilincing dan Cawang. Dan menjelang siang Anis menyambangi salah satu posko yaitu posko banjir DPC Kramat Jati yang daerahnya terdampak banjir cukup banyak," ungkapnya.

Saat bertemu dengan pengurus DPC Kramat Jati yang sedang berada di posko, Anis menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap sikap kesetiakawanan antar warga Jakarta Timur saat banjir melanda kawasan ini. Ia menyaksikan sendiri banyak warga yang menggelar pengungsian mandiri saat bencana tersebut datang.

“Saya benar-benar terkesan dengan sikap kesetiakawanan warga” ungkapnya Rabu (1/1/2020).

Anis juga memberikan apresiasi dan kesan mendalam kepada para relawan dan warga sekitar lokasi terdampak banjir yang terlihat berpartisipasi mengemas nasi bungkus untuk kebutuhan makan para pengungsi.

“Sikap warga yang saling bahu membahu mengatasi kondisi warga saat terjadi banjir patut diacungi jempol" katanya.

Banyak warga yang mau bertindak sebagai relawan untuk mengurusi warga lain yang terdampak banjir.

Pada Rabu (1/1/2020) malam, jumlah pengungsi terus meningkat. Dalam catatan struktur PKS Jakarta Timur yang mengurusi logistik pengungsi dan korban, jumlah warga Jakarta Timur yang mengungsi sempat mencapai 9.248 orang.

“Mengungsi itu artinya ya beralih dari rumahnya karena kondisi darurat. Alhamdulillah PKS di kawasan Jakarta Timur sigap mendirikan sejumlah posko-posko bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir” kata Anis menambahkan.

“Kita juga berterima kasih kepada para donatur, dermawan dan relawan PKS. Semoga para pengungsi bisa terurus dengan baik. Ada juga yang mengantar bamtuan sendiri ke lokasi para korban banjir. Ini bukti kesetiakawanan warga Jakarta Timur yang luar biasa,” pungkas Anis.

Ahmad Syaikhu Berikan Bantuan Korban Banjir di Kabupaten Bekasi

Ini semua musibah. Ujian dari Allah. Saatnya kita bergandengan tangan menolong saudara-saudara kita yang jadi korban. dan bantuan ini tak seberapa dibandingkan dengan penderitaan warga. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit meringankan

H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

Kab. Bekasi (03/02) --- Anggota DPR RI dari Ahmad Syaikhu mengunjungi tiga lokasi banjir di Kabupaten Bekasi, Kamis (2/01/2020). Politisi PKS itu juga memberikan bantuan kepada korban banjir.

Syaikhu meninjau lokasi banjir di Perumahan Tridaya dan Papan Mas Tambun Selatan serta Perumahan Trias Cibitung. Ketiga lokasi tersebut terkena banjir cukup parah. Ketinggian air mencapai hampir sedada orang dewasa.

"Ini semua musibah. Ujian dari Allah. Saatnya kita bergandengan tangan menolong saudara-saudara kita yang jadi korban," ujar Syaikhu yang berasal dari Dapil VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Syaikhu berdialog dengan warga dan mengunjugi dapur umum.

"Terimakasih Pak Syaikhu atas kunjungan dan bantuannya," kata Tarmuji, warga Perumahan Trias.

Selain mengunjungi korban banjir, Syaikhu juga memberikan bantuan logistik.

"Bantuan ini tak seberapa dibandingkan dengan penderitaan warga. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit meringankan," pungkas Syaikhu

PKS SIAGA BANJIR

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng

PKS insya Allah istiqomah berkhidmat untuk rakyat

Anggota Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali Sera turut serta gotong royong bersama warga membantu penanganan banjir. Beliau menyerukan kepada kepala daerah agar gerak cepat melakukan respon dan mitigasi bencana, serta mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi musim hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi di bulan Januari dan Februari ini.

Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng

Meninjau langsung Posko Warga Kampung Melayu

Anggota Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali Sera meninjau langsung Posko warga di kantor Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jaktim

"*Alhamdulillah* bisa berkunjung dan berdialog dengan warga dan Pak Lurah Kampung Melayu, Semoga Allah mudahkan dan limpahkan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir di Jabodetabek".

PKS SIAGA BANJIR

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, BA, MA

Meninjau Turan Kali Raya yang Jebol

Jum'at 3 Januari 2020 Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI Hj. Nur Azizah Tahmid, BA. MA bersama Ketua DPRa PKS Tugu, Bpk Asep meninjau turab Kali Laya yang Jebol di Perumahan Bukit Savana Resident RT 13/16 Tugu Cimanggis

Pada kesempatan tersebut beliau di sambut beberapa warga & Ibu Eva Ketua RT 13/16 Sebagai bentuk kepedulian kepada petugas yang masih bekerja membetulkan turab beliau juga menyerahkan bantuan dari Beliau & Team TA/SA Nur Azizah Tamhid, diterima oleh Ibu Eva Ketua RT 13/16 Tugu.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Dapur Umum Warga Korban Banjir

Rabu, 1 Januari 2019. Dr. Anis Byarwati melakukan kunjungan ke posko banjir DPC Kramat Jati. Dalam kesempatan ini Ibu Anis melakukan konsolidasi kegiatan yang akan dilakukan struktur dan menyerahkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir di daerah Jakarta Timur. Bantuan juga diberikan kepada posko-posko di DPC se Jakarta Timur

Tampak para relawan dan tim Ibu Anis membuka dapur umum dan menyampaikan bantuan kepada warga yang membutuhkan

PKS SIAGA BANJIR

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Bantuan untuk Warga Korban Banjir

Bekasi (1/1) - Tim dari Anggota Faksi PKS DPR RI Mahfudz Abdurrahman menyerahkan bantuan untuk warga terdam-pak banjir khususnya di wilayah Kota Bekasi.

Hujan yang terjadi sejak jelang pergantian tahun hingga beberapa hari telah menyebabkan banjir di sejumlah titik di wilayah jabodetbek yang menyebabkan warga mengungsi.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M.Si.

Tinjau Warga Terdampak Banjir

Jakarta (1/1) Hujan di sejumlah titik sejak Selasa sore hingga hari ini menyebabkan banjir di beberapa wilayah DKI dan sekitarnya,

Anggota Fraksi PKS DPR RI Daerah pemilihan DKI Jakarta II Dr. Hj. Kurniasih Mufidayanti, M.Si. bersama Lurah Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Bapak Sarwanto, SE turut memantau kondisi warga yang terdampak banjir yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Ahad Pagi tanggal 1 Januari 2020.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Selamat Tahun Baru 2020

Mari perkokoh iman dan persaudaraan, serta nilai-nilai kebangsaan menuju Indonesia yang lebih baik

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Tiga Catatan Fraksi PKS di Tahun 2019

Target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,30 persen dan Outlook APBN 2019 sebesar 5,20 persen. Terbukti tidak akan tercapai hingga akhir tahun 2019. Pemerintahan Jokowi tidak berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan baik dalam RPJMN 2015-2019 maupun APBN 2019

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (31/5) Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan catatan dan evaluasi akhir tahun 2019. Jazuli menyoroti utamanya pada tiga poin besar di bidang ekonomi, politik dan hukum.

Dalam Bidang ekonomi dan Kesejahteraan rakyat. Jazuli melihat bahwa Pertumbuhan ekonomi secara umum melambat dan defisit neraca perdagangan masih terjadi. Tercatat pada kuartal III-2019, pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 5,02 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sedangkan kinerja ekspor masih belum bisa diandalkan.

Target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,30 persen dan Outlook APBN 2019 sebesar 5,20 persen. Terbukti tidak akan tercapai hingga akhir tahun 2019. "Pemerintahan Jokowi tidak berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan baik dalam RPJMN 2015-2019 maupun APBN 2019" tegasnya.

Selain itu Jazuli menambahkan, yang juga menjadi catatan penting dipenghujung tahun 2019 ini adalah munculnya mega skandal Jiwasraya dengan gagal membayar polis nasabahnya hingga 12.4 Triliun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pada tahun 2020.

Dibidang kesejahteraan rakyat rendahnya angka inflasi pada angka 3 persen justru menunjukkan daya beli masyarakat terus mengalami tekanan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan. Ekonomi nasional masih tertolong dengan tumbuhnya sektor informal ditengah-tengah masyarakat. Program iuran BPJS yang direncanakan naik 100 persen dan tarif tol mulai Januari 2020 akan menambah beban rakyat dan menjadi kado tahun baru yang pahit bagi masyarakat.

Polarisasi dan segregasi politik di antara masyarakat masih sangat tajam. Hal ini karena adanya sikap pendikotomian yang terus dipelihara karena adanya beda pandangan dan sikap. Yang secara teknis sering disimplifikasi menjadi sikap toleran dan radikal, apalagi jika pandangan tersebut beda haluan dengan Pemerintah.

"Kedepan kita perlu menjaga stabilitas politik, diantaranya pihak eksekutif jangan banyak mengeluarkan statement atau komentar yang menyulut emosi serta menimbulkan kegaduhan publik" jelas Jazuli.

Sementara itu, dalam bidang penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. misalnya, peristiwa demonstrasi pasca Pilpres 2019, yang berujung pada penangkapan, penahanan sewenang-sewenang dan jatuhnya korban jiwa. Bahkan, beberapa ulama dan tokoh agama ada yang dipersekusi dan dikriminalisasi dalam menyampaikan ceramah dan ajaran agama.

"Tahun 2020 adalah awal kita membuka lembaran baru, perlu keseriusan bersama menghadirkan iklim demokrasi yang sehat, kompetitif dan membuahkan kesejahteraan rakyat", pungkasnya.

PKS Terus Desak Pembentukan Pansus Jiwasraya

Kalau kita lihat ada persoalan struktural di perusahaan asuransi tersebut dan mungkin sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, masalahnya sangat rumit seperti produk saving plan, kualitas aset, penempatan investasi yang tidak kredibel hingga masalah perilaku pemburu rente. Saya sangat menyayangkan persoalan Jiwasraya tidak pernah dibuka ke publik, dan setelah memburuk dan gagal bayar baru terungkap

H. ECKY AWAL MUCHARAM
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan

Jakarta (03/01) --- Merebaknya kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya menjadi catatan buruk tata kelola industri keuangan di Indonesia.

Dengan status perusahaan asuransi BUMN sorotan publik terhadap Jiwasraya semakin intens dan terus meminta kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Sebagai sektor yang berbisnis lewat kepercayaan, kasus Jiwasraya berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat.

Dampaknya bisa sangat kompleks dan memengaruhi industri keuangan, hingga perekonomian nasional secara menyeluruh.

Anggota DPR RI Komisi XI Ecky Awal Mucharam menyesalkan apa yang terjadi pada Jiwasraya.

"Kalau kita lihat ada persoalan struktural di perusahaan asuransi tersebut dan mungkin sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu," papar Ecky di Jakarta (3/1).

Ecky menjelaskan masalahnya sangat rumit seperti produk _saving plan_, kualitas aset, penempatan investasi yang tidak kredibel hingga masalah perilaku pemburu rente.

"Saya sangat menyayangkan persoalan Jiwasraya tidak pernah dibuka ke publik, dan setelah memburuk dan gagal bayar baru terungkap", papar Ecky.

Wakil ketua Fraksi PKS ini menyatakan pihaknya melihat kasus Jiwasraya lebih disebabkan oleh _fraud_.

"Untuk itu harus segera dilakukan audit investigasi terhadap asset dan aliran investasinya. Jika dipahami lebih lanjut, kejahatan di Jiwasraya bisa digolongkan sebagai bentuk _Organized Crime_," kata Ecky.

Hal ini lanjut Ecky, bermakna bahwa kejahatan dilakukan oleh internal secara masif dan terorganisir dalam jangka waktu cukup lama. Dalam kasus ini, nasabah terus menjadi pihak yang dirugikan.

"PKS melihat perlu upaya maksimal membongkar permasalahan yang melingkupi Jiwasraya, termasuk pembentukan Pansus Jiwasraya," papar Ecky.

"Pansus bisa meminta dilakukannya audit investigasi terhadap semua asset, investor dan aliran dana investasi. Kami ingin kasus ini jelas dan tuntas," tutup Ecky.

Thoriq Hidayat Dukung Aksi Bela Uighur di Kedubes China

Saya berjanji, pada masa reses ini akan mengajak alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat di dapil, untuk peduli dengan saudara-saudara muslim yang ditindas diseluruh dunia, terutama uighur dan palestina

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi I DPR RI / Dapl Jawa Barat XI

Jakarta (30/12) –– Menanggapi kecaman keras Persatuan Ulama Al-Azhar atas tindakan penidasan China terhadap jutaan Muslim Uighur di Xinjiang, anggota DPR RI Thoriq Hidayat berharap agar seruan tersebut diikuti seluruh umat Islam di dunia.

Thoriq menyambut positif aksi damai ribuan massa yang memadati depan Kedubes China di Jakarta, Jumat, (27/12).

"Aksi yang dihadiri dari berbagai ormas Islam mengecam dan mengutuk keras tindakan zalim rezim komunis China terhadap saudara muslim Uighur", tegas Thoriq.

Thoriq Hidayat menanggapi sebagian masyarakat yang memandang aksi bela muslim uighur di kedubes China tidak perlu dilakukan. Beliau mengatakan, Sebagaimana pisau, bahwa aksi unjuk rasa hanyalah sebuah sarana yang bisa digunakan untuk ber-amar makruf wa nahi munkar atau justru untuk aksi kejahatan, tergantung aktor yang memainkannya.

"Islam membolehkan gerakan massa yang tidak menimbulkan kerusakan namun sangat mencela tindakan destruktif. Hal tersebut sejalan dengan kaidah, Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan", ungkap Thoriq.

Thoriq juga menyayangkan saat Mahfud MD mengatakan pemerintah melakukan diplomasi lunak yang artinya pemerintah tidak mau mengintervensi karena menganggap soal etnis uighur adalah urusan pemerintah China.

"Pernyataan ini keluar setelah mendapatkan penjelasan dari duta besar China", imbuhnya.

Menurut beliau, tidak seharusnya pemerintah Indonesia menjadikan penjelasan Kedubes China sebagi satu-satunya rujukan kemudian mengabaikan fakta-fakta kredibel terjadinya pelanggaran Ham di Xinjiang yang sudah tersebar ke seluruh dunia.

"Saya berjanji, pada masa reses ini akan mengajak alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat di dapil, untuk peduli dengan saudara-saudara muslim yang ditindas diseluruh dunia, terutama uighur dan palestina", tutup Thoriq.

Jazuli Juwaini: Natuna Kedaulatan NKRI. Titik!

Penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan Cina dan penerobosan yang dilakukan Coast Guard Cina itu ilegal, melanggar hukum internasional, termasuk Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral Cina. Jika protes keras RI tidak digubris Cina, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima Cina

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (4/1) - Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas Wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia. Untuk itu negara manapun harus menghormati kedaulatan NKRI termasuk Cina.

"Natuna kedaulatan NKRI. Titik! Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim Cina atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi," tegas Jazuli.

Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai tepat protes keras yang dilayangkan Menteri Luar Negeri dengan memanggil Dubes Cina dan Nota Diplomatik langsung ke Pemerintah Cina di Beijing. Menurut Jazuli, yang perlu ditekankan bukan kita yang mencari masalah, tapi setiap bentuk pelanggaran batas wilayah atas kedaulatan NKRI punya konsekuensi serius.

"Penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan Cina dan penerobosan yang dilakukan Coast Guard Cina itu ilegal, melanggar hukum internasional, termasuk Keputusan SCS Tribunal 2016 yang telah mematahkan klaim unilateral Cina. Jika protes keras RI tidak digubris Cina, Pemerintah RI harus memastikan semua konsekuensi serius, tegas, dan terukur yang akan diterima Cina," pungkas Jazuli.

Menurut Jazuli Juwaini, Indonesia dan Cina adalah dua negara bersahabat dan selama ini bekerja sama baik. Oleh karena itu Pemerintah Cina jangan cari masalah dengan mengusik kedaulatan Indonesia.

"Sekali lagi bukan kita yang cari masalah. Kita inginnya bersahabat baik. Tapi kalau Cina cari masalah yang mengusik kedaulatan negara, kita akan jawab dengan tegas dengan seluruh cara, sarana, dan sumber daya *at all cost*," pungkas Jazuli.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Desak Prabowo Soal Sistem Inspeksi Maritim Nasional

Saya minta kepada Pak Menhan agar sistem itu segera diintegrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini, harus dibangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia,"

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (04/01) --- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jum'at, 03/01/2020, meminta keseriusan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam membangun Sistem Inspeksi Maritim Nasional (Marine Surveillance System).

Kebutuhan akan informasi melalui Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) dalam sistem inspeksi maritim nasional menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan dalam rangka menghadapi perkembangan global di bidang pertahanan dan keamanan.

"Saya minta kepada Pak Menhan agar sistem itu segera diintegrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini, harus dibangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia," kata Kharis.

Ia juga meminta pemerintah Republik Indonesia segera menindak nyata di lapangan terhadap segala upaya negara manapun yang mau melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tegas, terarah dan terukur.

"Puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3,8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kalau terbukti, saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard China. Tapi beri tindakan tegas, terukur dan jelas karena kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI," kata Kharis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menanggapi klaim sebelumnya oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Cheng Shuang, pada Selasa (31/12) bahwa Pemerintah Republik Rakyat China menganggap mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan yang posisinya dekat dengan Natuna, Kepulauan Riau, yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

"Silakan mereka klaim, tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional, ada ZEE. Dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," tegas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5 atau Solo Raya itu.
Foto : dpr.go.id

PKS: Kita Perlu Tingkatan Sistem Keamanan Laut RI

Saya mendorong dibahasnya RUU Keamanan Laut yang sudah masuk Prolegnas 2019-2024. Dengan RUU ini kita harapkan sistem keamanan laut serta fungsi Bakamla menjadi jelas dan lebih kuat, juga memaksimalkan pemenuhan alutsista keamanan laut, sehingga dapat memberi efek gentar kepada kapal-kapal asing agar tidak berani melanggar wilayah laut kita

H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (30/12) — Beredar video yang menunjukkan kehadiran kapal-kapal ikan asing di perairan Natuna. Menurut Herman, Ketua Nelayan Lubuk Lumbang di Kabupaten Natuna, kapal coast guard China turut mengawal kapal-kapal ikan dari negaranya yang mencuri di perairan Indonesia.

Pada 26 Oktober 2019 anggota kelompoknya sempat diusir oleh kapal coast guard China, padahal sedang berada di wilayah Indonesia.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Senin (30/12) melalui telepon seluler menyatakan jelas tidak imbang, kapal nelayan kita berhadapan dengan kapal cost guard China yang sedang mengawal nelayan mereka mencuri ikan di wilayah RI.

"Ini menunjukkan kita masih perlu meningkatkan Sistem Keamanan Laut kita. Badan Keamanan Laut (Bakamla) selama ini melaksanakan fungsinya berdasar Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan", tegas Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menyesalkan kapal asing memasuki wilayah perairan Indonesia dengan bersikap sampai mengusir nelayan kita, seolah-seolah perairan itu masuk wilayahnya China.

"Hal ini tentu tak bisa dibiarkan. Ke depannya kita harus lebih memikirkan keamanan di daerah perbatasan seperti Natuna ini", pungkasnya.

Sukamta menjelaskan bahwa sistem keamanan laut selama ini berjalan dengan Multi Agency Single Task. Beberapa kementerian Lembaga memiliki tugas penegakan hukum di laut. Hal ini tentunya menyebakan penegakan keamanan di laut tidak efektif dan tumpang tindih serta borosnya anggaran. Masalah ini perlu kita pikirkan agar berjalan dengan Single Agency Multi Task.

“Karena itu, saya mendorong dibahasnya RUU Keamanan Laut yang sudah masuk Prolegnas 2019-2024. Dengan RUU ini kita harapkan sistem keamanan laut serta fungsi Bakamla menjadi jelas dan lebih kuat, juga memaksimalkan pemenuhan alutsista keamanan laut, sehingga dapat memberi efek gentar kepada kapal-kapal asing agar tidak berani melanggar wilayah laut kita,” harap Wakil Rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Soal Ibukota Baru, Pemerintah Harus Fokus, Jangan Rugikan Masyarakat

"Reses ini kami gelar guna menyerap aspirasi masyarakat Kaltim tentang perkembangan-perkembangan baik nasional dan daerah khususnya Kaltim, Terkait Kaltim yang menjadi ibu kota perlu dikaji DPR RI dan Komisi II yang turut ikut menggodok perubahan RUU pemindahan ibu kota

KH. AUS HIDAYAT NUR
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kaltim

Balikpapan (30/12) --- Pemindahan IKN (Ibu Kota Negara) sebaiknya tidak menjadikan euforia di masyarakat. Pemerintah juga harus fokus dalam pemindahan IKN dan menjalankan sebaik-baiknya sehingga tidak merugikan masyarakat Kaltim.

Demikian disampaikan Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) KH Aus Hidayat Nur saat menggelar silaturahmi sekaligus serap aspirasi (Reses) bersama tokoh masyarakat dan sejumlah mantan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ada di Balikpapan, Senin (30/12).

Reses dihadiri Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PKS H Sonhaji, anggota DPRD Provinsi Kaltim Hajjah Fitri Maisyaroh ST dan seluruh pengurus PKS Balikpapan, digelar di Her Hotel, Jalan MT Haryono, No.55, Balikpapan Utara, Kaltim.

"Reses ini kami gelar guna menyerap aspirasi masyarakat Kaltim tentang perkembangan-perkembangan baik nasional dan daerah khususnya Kaltim," kata KH Aus.

Terkait Kaltim yang menjadi ibu kota perlu dikaji DPR RI dan Komisi II yang turut ikut menggodok perubahan RUU pemindahan ibu kota.

Secara umum PKS akan mengawal Ibu Kota Provinsi Kaltim dan akan terus memperjuangkan, karena pemindahan ibu kota kebanyakan atas permintaan pemerintah provinsi dan stakeholder yang meminta Kaltim menjadi ibu kota.

Pemindahan ibu kota ke Kaltim tidak serta merta pindah begitu saja, pemerintah juga harus segera menyiapkan tata ruang yang harus jelas, baik fasilitas pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat mengantisipasi perpindahan penduduk dan juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai 1 juta jiwa dari luar daerah ke Kaltim merupakan pekerjaan besar dan perlu pengawalan.

KH Aus juga berharap agar masyarakat Kaltim tetap tenang dan bisa bekerjasama baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam pembangunan.

"Baik secara mental maupun secara fisik, karena ada hal-hal yang dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Catatan Akhir Tahun Bidang Hukum dan HAM

Data lain yang diungkap oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mencatat sepanjang 2019 kekerasan terjadi kepada 53 jurnalis. Menurut IJTI pola kekerasannya beragam dari kekerasan, intimidasi sampai persekusi yang kebanyakan oleh aparat keamanan. Kita perlu memberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan yang optimal untuk para jurnalis dalam menjalankan tugasnya

Habib ABOE BAKAR AL-HABSYI
Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (31/12) -- Turunnya tindak pidana terorisme pada tahun 2019 mendapatkan apresiasi Anggota DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi.

Menurut Aboe, catatan Polri ada sembilan aksi terorisme seperti bom bunuh diri sejak awal tahun ini.

"Jumlah tersebut turun 52,6% dibanding 2018 yang mencapai 19 aksi. Sepanjang tahun lalu, pelaku terorisme mencapai 395 orang. Sedangkan pada tahun ini, jumlahnya menurun menjadi 297 orang", terangnya.

Anggota Komisi 3 DPR RI ini menambahkan berbagai upaya pencegahan perlu terus dilakukan untuk menekan agar tindakan terorisme tidak terjadi lagi.

"Upaya keras Badan Narkotika Nasional dalam melawan peredaran narkoba juga perlu diapresiasi, pada tahun 2019 ini setidaknya menurut laporan BNN, mereka telah mengungkap sebanyak 33.371 kasus", paparnya.

Namun, Aboe menegaskan kerja kerjas ini perlu ditingkatkan karena pengguna narkoba di Indonesia meningkat 0,03 persen, sehingga saat ini kurang lebih ada 3,6 juta pengguna di Indonesia.

"Karenanya BNN perlu berkolaborasi dengn berbagai pihak untuk optimalisasi kerja melawan peredaran narkoba di Indonesia", lanjut pria berkacamata ini.

Pada sisi lain, Aboe Bakar Alhabsyi juga menyatakan perlu ada beberapa hal yang dievaluasi. Misalkan saja jika melihat laporan dari para aktifis, sepertinya penegakan HAM di Indonesia pada 2019 ini banyak catatan.

"Koalisi Peringatan Hari HAM (Koper HAM) mencatat Sepanjang 2019 sedikitnya terjadi 51 kasus pelanggaran HAM dan belum diselesaikan oleh pemerintah. Tentunya ini harus menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah", pungkasnya.

Selain itu YLBHI dan Komnas HAM menunjukan setidaknya 52 orang meninggal dalam demonstrasi yang diadakan sepanjang tahun 2019.

"Tentunya ini adalah bagian dari berita buruk untuk negara hukum yang demokratis seperti Indonesia. Oleh karenanya perlu ada keseriusan dari pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan HAM untuk masyarakat", ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Data lain yang diungkap oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mencatat sepanjang 2019 kekerasan terjadi kepada 53 jurnalis. Menurut IJTI pola kekerasannya beragam dari kekerasan, intimidasi sampai persekusi yang kebanyakan oleh aparat keamanan.

"Kita perlu memberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan yang optimal untuk para jurnalis dalam menjalankan tugasnya", tuturnya.

Harus diigat bahwa perlindungan HAM adalah bagian dari amanah konstitusi kita. Karena Pasal 27 Dan 28 UUD 1945 pada pokoknya telah mengatur perlindungan dasar yang harus diberikan negara kepada rakyat.

"Seperti untuk memberikan perlakuan hukum, kesehatan, pendidikan, akses pekerjaan dan perhidupan yang layak, serta Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan", tutup Habib Aboe.

Foto : dpr.go.id

Masa Reses, Slamet Beri Perhatian Khusus Kartu Tani

Temuan di lapangan akan dibawa ke persidangan DPR RI dan diteruskan ke pemerintah pusat. Upaya ini karena Kartu Tani menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan bidang pertanian. Sebab pada dasarnya kartu tani merupakan kartu yang bisa digunakan para petani untuk berbagai kebutuhan dan memenuhi keperluan pertaniannya

drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jawa Barat IV

Sukabumi (29/12) --- Kalangan Komisi IV DPR RI memberikan perhatian khusus pada efektifitas penyaluran kartu tani kepada para petani.

Slamet berharap berbagai kebutuhan petani dalam bercocok tanam bisa difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

Seperti diketahui, program Kartu Tani digunakan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani.

" Dalam reses masih meminta masukan dari masyarakat petani, nelayan, perkebunann, dan stakeholder terkait," ujar anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten/Kota Sukabumi, Slamet dalam reses di Hotel Augusta, Sabtu (29/12).

Ia mengatakan pada reses kali ini ingin mendengar keluhan dan masukan petani misalnya terkait penyaluran kartu tani yang berpengaruh pada penyaluran subsidi pupuk.

Nantinya lanjut Slamet, temuan di lapangan akan dibawa ke persidangan DPR RI dan diteruskan ke pemerintah pusat.

"Upaya ini karena Kartu Tani menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan bidang pertanian. Sebab pada dasarnya kartu tani merupakan kartu yang bisa digunakan para petani untuk berbagai kebutuhan dan memenuhi keperluan pertaniannya", ungkap Slamet.

Sehingga ungkap Slamet, kartu tani didorong membawa dampak yang positif bagi semua petani di Indonesia. Khususnya mendapatkan kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Hal ini karena pupuk merupakan komponen penting dalam sebuah pertanian.

Anggota DPR RI dari PKS ini juga memberikan perhatian pada masalah kedaulatan pangan. Terutama pada pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-undang tentang pangan.

" Pemerintah segera membentuk badan pangan dan kami ingin mendorong segera direalisasikan," ujar Slamet.

Sebab kisruh pangan saat ini misalnya terkait impor akibat data tumpang tindih tidak akan terjadi atau dimininalisir jika ada badan pangan nasional.

Reses di Tanah Datar, Hermanto Serahkan Alsintan kepada Petani

Bantuan ini merupakan upaya negara dalam melakukan modernisasi sektor pertanian untuk mencapai target swasembada pangan", Sekarang ini, kita tidak mungkin lagi bertani dengan cara mencangkul untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia yang berjumlah 265 juta orang. Karena itu, solusinya adalah alsintan

Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI / Dapil Sumbar

Kab. Tanah Datar (28/12) --- Anggota DPR RI Hermanto dalam perjalanan reses perorangannya di Kabupaten Tanah Datar, Jumat (27/12), mengadakan pertemuan dengan para petani dilanjut penyerahan alsintan bantuan pemerintah pusat kepada petani di halaman kantor Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Alsintan yang diserahkan berupa 13 unit traktor roda 2 dan 2 unit pompa air.

"Bantuan ini merupakan upaya negara dalam melakukan modernisasi sektor pertanian untuk mencapai target swasembada pangan", ujarnya dalam sambutan penyerahan bantuan tersebut.

Sekarang ini, menurutnya, kita tidak mungkin lagi bertani dengan cara mencangkul untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia yang berjumlah 265 juta orang. Karena itu, solusinya adalah alsintan.

"Alsintan ini harus dipakai, dipelihara dan dikuasai teknologinya", ucapnya.

Suatu saat nanti, lanjutnya, akan ada alsintan yang operasionalnya berbasis komputer. Mesin bergerak dengan perintah komputer. "Di negara lain sudah melakukan hal tersebut. Dengan mesin ini, biaya produksi bisa lebih murah", tutur legislator dari FPKS ini.

"Mau tidak mau kita harus masuk ke era ini. Di era ini saya yakin kaum muda akan berbondong-bondong terjun ke dunia pertanian", tandasnya.

Lebih jauh Hermanto meminta kelompok tani penerima bantuan agar merawat baik-baik bantuan tersebut supaya bisa memberikan kemanfaatan dalam jangka panjang.

"Barang-barang ini milik negara yang dipercayakan penggunaannya kepada kelompok-kelompok tani. Karena itu pakailah, peliharalah dan rawat dengan baik", demikian pesan legislator dapil Sumbar I dari FPKS ini.

Hermanto menyerahkan berbagai bantuan tersebut bersama Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani, Kepala Dinas Pertanian Yulfiardi serta dua anggota DPRD setempat yaitu Abu Bakar dan Istiqlal. Selain menyerahkan alsintan, reses di Tanah Datar diisi juga dengan mengunjungi Poktan Sukatani Sejahtera dan KWT Annisa Srikandi di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara serta Poktan Vini Vidi Vici di Jorong Andaleh, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kec Sungayang, Kab. Tanah Datar.

Banjir Jabodetabek, Mengapa Data Potensi Banjir BMKG Tak Akurat?

Seharusnya, sebagai lembaga Negara yang menyiapkan dan menganalisa data iklim, BKMG bisa membuat prediksi yang akurat terlebih kita berada di daerah bencana. Bagaimana bisa mewujudkan BMKG berkelas dunia demi menuju Indonesia selamat dan menjadi rujukan masyarakat internasional kalau datanya saja sering tidak akurat"

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO
Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (02/01) --- Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, mempertanyakan akurasi data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi daerah rawan banjir.

"Berdasarkan data Prakiraan Daerah Potensi Banjir Dasarian I dan II Januari 2020 yang dirilis BMKG di situs resminya tidak ada potensi banjir besar di Jabodetabek, bahkan DKI Jakarta aman dari banjir", ungkap Sigit.

Sigit mempertanyakan mengapa akurasi BMKG tentang prakiraan daerah potensi rawan banjir meleset jauh seperti ini ?

"Rilis BMKG di website resminya, diperkirakan DKI Jakarta aman banjir pada dasarian I Januari 2020. Tapi, kenyataannya banjir besar. Begitu juga dengan daerah Jabodetabek lainnya semua diprediksi banjir rendah, tapi yang terjadi banjir sampai menenggelamkan rumah", kata Sigit.

Sigit menyesalkan rendahnya akurasi data BMKG dalam memprakirakan potensi banjir sehingga menyebabkan kurangnya antisipasi pemerintah dan warga.

"Saya menyayangkan juga tidak berjalannya early warning system bencana banjir sehingga banyak warga yang terjebak dan ketidaksiapan pemerintah menangani bencana sehingga lambannya proses evakuasi dan distribusi bantuan, khususnya makanan, pakaian dan obat-obatan", pungkasnya.

Menurut Sigit, ini bukan pertama kali terjadi. Tahun lalu BMKG juga melakukan kesalahan prediksi tsunami di Selat Sunda. Akibatnya banyak korban jiwa.

"Seharusnya, sebagai lembaga Negara yang menyiapkan dan menganalisa data iklim, BKMG bisa membuat prediksi yang akurat terlebih kita berada di daerah bencana. Bagaimana bisa mewujudkan BMKG berkelas dunia demi menuju Indonesia selamat dan menjadi rujukan masyarakat internasional kalau datanya saja sering tidak akurat", tutur Sigit.

Seperti diketahui, daerah Jabodetabek mengalami banjir besar sejak Rabu dini hari. Ketinggian banjir disejumlah pemukiman bahkan sampai atap rumah.

Tak hanya merendam pemukiman, benjir diawal tahun

2020 juga merendam sejumlah jalan tol sehingga menyebabkan kemacetan parah.

Salah satu faktor penyebab banjir besar disebagian wilayah Jabodetabek awal tahun ini adalah curah hujan yang sangat tinggi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengutip data BMKG, merilis curah hujan hari ini di Jakarta tertinggi sejak tahun 1996.

Titik hujan tertinggi ini ada di Jakarta Timur dengan curah hujan 377 mm/hari. Sementara curah hujan pada banjir besar tahun 1996 hanya berkisar 216 mm/hari.

Foto : dpr.go.id

Gelar Reses, Saadiah Terima Sejumlah Aspirasi Masyarakat

Saya dan Fraksi PKS telah menggelar FGD yang mengundang Pimpinan PLN Pusat. Persoalan ini sudah saya sampaikan. Persoalan data RTM pengguna daya 900 VA, elektrifikasi di daerah kepulauan maupun akses listrik. Alhamdulillah, salah satu aspek yang sudah direspon adalah pendataan ulang agar masyarakat kurang mampu tetap mendapat subsidi listrik

SAADIAH ULUPUTTY, S.T.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Maluku

Ambon (31/12) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menerima sejumlah aspirasi masyarakat, di Kabupaten Maluku Tengah. Aspirasi masyarakat disampaikan saat Reses pasca masa sidang pertama.

"Benar bahwa ada aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada saya di masa reses ini," kata Saadiah saat dikonfirmasi, Senin, 30/12/2019.

Salah satu yang menjadi sorotan saat berkunjung ke Negeri Sepa, yakni persoalan pendidikan mulai dari sumber daya guru sampai fasilitas pendidikan.

"Masyarakat meminta kalau bisa diperhatikan nasib guru honor serta pembangunan sekolah perikanan yang belum direalisasikan. Ada permintaan untuk penyediaan sumur bor untuk sekolah," kata Saadiah.

Srikandi PKS itu juga mendapat masukan terkait permasalahan listrik yang belum baik.

"Kami juga menerima keluhan soal listrik. Sudah saya sampaikan bahwa saya di komisi VII dalam rapat-rapat dengan menteri ESDM maupun Plt. Dirut PLN selalu menekankan soal elektrifikasi listrik Maluku yang harus jadi perhatian Pempus," pungkasnya saat Reses di Kota Masohi.

Perempuan yang akrab disapa Caca Diah itu melanjutkan, dirinya bersama Fraksi PKS di DPR RI telah mendorong Pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan listrik bagi kesejahteraan rakyat.

"Saya dan Fraksi PKS telah menggelar FGD yang mengundang Pimpinan PLN Pusat. Persoalan ini sudah saya sampaikan. Persoalan data RTM pengguna daya 900 VA, elektrifikasi di daerah kepulauan maupun akses listrik. Alhamdulillah, salah satu aspek yang sudah direspon adalah pendataan ulang agar masyarakat kurang mampu tetap mendapat subsidi listrik," lanjutnya.

Selain itu, masyarakat juga meminta agar Saadiah memperjuangkan perbaikan harga komoditas rempah seperti cengkeh dan pala.

Menurut Uluputty, aspirasi masyarakat yang disampaikan akan diperjuangkan olehnya serta Anggota DPR RI Fraksi PKS yang ada di Komisi lain.

"Sudah didata. Aspirasi yang masuk di komisi saya akan diperjuangkan. Yang bersentuhan dengan komisi lain akan kami kawal untuk disampaikan oleh anggota Fraksi PKS yang ada di komisi-komisi terkait," ulasnya.

Sesuai jadwal, Saadiah bersama anggota DPR RI lainnya sedang menjalankan reses yang dimulai sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai 10 Januari 2020.

Reses dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan membangun komunikasi dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPR RI.

Sah! Tarif Dasar Listrik 900 VA Batal Naik

Jakarta (31/12) — Setelah menimbulkan polemik di tengah masyarakat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memutuskan pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM) tidak akan dikenakan penyesuaian tarif terhitung sejak 1 Januari 2020.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Sebelumnya, PLN mengajukan penyesuaian tarif listrik kepada Kementerian ESDM untuk pelanggan listrik golongan 900 VA – RTM untuk mengurangi beban APBN.

Tahun 2019 pemerintah harus membayar kompensasi listrik kepada PLN pada kuartal I, II, dan III berturut-turut sebesar Rp 8,4 triliun, Rp 13,71 triliun, dan Rp 20,83 triliun. Rencana penyesuaian tarif terhadap pelanggan 900 VA – RTM di tahun 2020 diproyeksikan mampu menurunkan subsidi listrik secara keseluruhan menjadi Rp 54,8 triliun. Angka ini lebih rendah dari APBN 2019 yang sebesar Rp 65,3 triliun.

Namun, rencana kenaikan tarif listrik tersebut telah ditentang keras oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR.

Anggota Komisi VII FPKS Rofik Hananto mengamati faktor yang memengaruhi penyesuaian tarif seperti ICP, tingkat kurs, dan inflasi menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik.

Kondisi tersebut, menurut Rofik, seharusnya menjadikan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik.

"Meskipun nantinya terdapat penurunan alokasi subsidi listrik dalam APBN 2020, pemerintah tetap bisa menunda kenaikan tarif listrik. Jika kita amati kondisi ekonomi masyarakat yang belum membaik, apalagi faktor yang memengaruhi penyesuaian tarif menunjukkan kondisi yang baik, tidak seharusnya pemerintah menaikkan tarif listrik. Naiknya tarif listrik ini justru bisa mengerek tingkat inflasi yang seharusnya tidak terjadi", ungkapnya

> "Dalam rangka efisiensi produksi listrik nasional, PLN harus mulai melakukan konversi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pembangkit listriknya dengan EBT sebagai energi yang lebih murah dan ramah lingkungan demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan"
>
> **H. ROFIK HANANTO, SE**
> Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS

Lebih jauh lagi, politisi dari Dapil Jawa Tengah VII tersebut juga memberikan terobosan solusi untuk PLN dalam mencari alternatif efisiensi produksi listrik nasional.

Menurut Rofik, Energi Baru Terbarukan (EBT) sangat penting untuk menjaga kontinuitas pasokan energi yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"EBT berkaitan dengan kelistrikan dan bahan bakar. Pada kelistrikan ada (potensi) air, angin, matahari, laut, panas bumi, dan biomassa. Perlu segera dibuat program yang masif dan terstruktur untuk penguatan EBT dengan biomassa sebagai contohnya", lanjutnya.

Menurutnya, PLN bisa mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menambah rasio elektrifikasi nasional melalui EBT.

"Dalam rangka efisiensi produksi listrik nasional, PLN harus mulai melakukan konversi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pembangkit listriknya dengan EBT sebagai energi yang lebih murah dan ramah lingkungan demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan", pungkas Rofik.

PKS Minta Pemerintah Kebut Target Jaringan Gas Nasional

Warga di wilayah Tangerang Selatan juga perlu diperhatikan. Penggunaan gas alam ini tentu sangat menguntungkan warga. Selain harganya murah, gas alam ini relatif aman dan tersedia setiap waktu. Jadi warga tidak perlu khawatir ada kelangkaan gas seperti yang terjadi beberapa waktu lalu

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Tangerang (31/13) --- Wakil Ketua FPKS DPR-RI, Mulyanto minta pemerintah fokus dan sungguh-sungguh merealisasikan target pengembangan jaringan gas (jargas) di berbagai daerah.

Hal ini penting dilakukan sebagai upaya pemanfaatan energi alternatif sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan.

"Memang pada awalnya kita membutuhkan anggaran yang lebih untuk pengembangan jaringannya. Tapi untuk jangka panjang, jargas ini bisa menghemat banyak hal," ungkap Mulyanto.

agi pemerintah, menurut Mulyanto, jargas bisa menghemat devisa karena kita bisa mengurangi impor migas sebagai sumber energi domestik.

"Sedangkan bagi masyarakat, biaya menggunakan gas alam jauh lebih murah karena harga gas alam hanya 40% dari harga gas tabung LPG," ujar Mulyanto saat kunjungan reses ke Kantor Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Tangerang, Banten, Senin (30/12).

Mulyanto menyayangkan pengembangan jargas secara nasional, termasuk di daerah pemilihannya, Tangerang raya, masih minim.

Saat ini jargas baru tersedia di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk wilayah Kota Tangerang Selatan baru dikembangkan pada tahun 2020.

Harusnya, menurut Mulyanto, Pemerintah dapat mengembangkan jargas ke wilayah Kota Tangerang Selatan. Karena di wilayah ini sudah tersedia pipa penyalur gas.

"Warga di wilayah Tangerang Selatan juga perlu diperhatikan. Penggunaan gas alam ini tentu sangat menguntungkan warga. Selain harganya murah, gas alam ini relatif aman dan tersedia setiap waktu. Jadi warga tidak perlu khawatir ada kelangkaan gas seperti yang terjadi beberapa waktu lalu," ujar anggota Komisi VII DPR-RI ini.

Berdasarkan data Kantor PGN Area Tangerang diketahui bahwa jumlah pelanggan rumah tangga di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang mencapai 8.705 pelanggan. Sedangkan pelanggan golongan industri komersial 318 pelanggan.

Meskipun jumlah pelanggan hanya 318 tapi

golongan industri komersil mengkonsumsi gas sebanyak 90% dari total kebutuhan gas area Tangerang.

"Data ini menunjukan bahwa penggunaan gas untuk konsumsi rumah tangga masih sangat minim. Ke depan harusnya jumlah pelanggan gas golongan ini dapat ditingkatkan," tegas Mulyanto.

Di Masa Reses, Bukhori Terima Advokasi Kepala Sekolah Madrasah Swasta Jawa Tengah

Madrasah merupakan wadah kita untuk memperbaiki umat, karena di madrasah diajarkan bukan hanya nilai-nilai dunia tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Sudah sepatutnya saya dan PKS akan mengawal dan membantu menyelesaikan permasalahan madrasah ke kementerian agama baik tingkat kanwil maupun pusat,"

KH. BUCHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI / Dapl Jawa Tengah I

Jakarta (30/12) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf, di masa resesnya menerima advokasi kepala sekolah madrasah swasta Jawa tengah.

Kepala sekolah madrasah menceritakan bagaimana perkembangan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah ibtidaiyah.

Menurut kepala-kepala sekolah madrasah bahwa perkembangan minat masyarakat akan madrasah tumbuh tetapi tidak dengan membaiknya fasilitas madrasah, Rabu, (25/12/2019).

"Madrasah ibtidaiyah semakin banyak peminatnya, tapi bangunan madrasah perlu renovasi dan bertambahnya jumlah kelas. Bantuan pemerintah ke madrasah sangatlah kecil, hanya lewat BOS (bantuan operasional sekolah) itupun kena pemotongan dengan alasan efisiensi," ungkap kepala sekolah madrasah.

Kepala sekolah menjelaskan bahwa ada sekolah yang atapnya disanggah oleh satu kayu besar untuk menahan roboh atap sekolah. Ada madrasah dari kelas satu sampai kelas enam hanya menggunakan kelas itu-itu saja karena terbatasnya kelas.

Kepala sekolah berharap kepada pak kiyai Bukhori untuk membantu mengadvokasi permasalahan madrasah, baik itu infrastruktur sekolah, kualitas guru-guru madrasah, dan murid yang tidak mampu.

Sementara itu menanggapi permohonan Kepala Sekolah, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori mengatakan siap membantu menyesaikan terkait permasalahan madrasah-madrasah.

Bukhori bersama anggota dewan PKS akan membawa permasalahan madrasah ke kanwil Kemenag provinsi Jawa tengah dan akan langsung mengadvokasi ke bapak menteri agama.

"Madrasah merupakan wadah kita untuk memperbaiki umat, karena di madrasah diajarkan bukan hanya nilai-nilai dunia tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Sudah sepatutnya saya dan PKS akan mengawal dan membantu menyelesaikan permasalahan madrasah ke kementerian agama baik ditingkat kanwil maupun pusat," ungkap Bukhori.

Reses Perdana, Nur Azizah Tahmid Bangun Rumah Rehabilitasi HIV-AIDS

Bekasi (30/12) --- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nur Azizah Tahmid menyelenggarakan reses perdananya di kantor DPD PKS Kota Bekasi, Bekasi Barat, Jumat (27/12/2019).

Di awal acara Nur Azizah memaparkan tugasnya di DPR RI Komisi VIII

"Di komisi VIII kami menangani masalah agama dan sosial. Termasuk di dalamnya menangani masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bencana, juga Haji," paparnya.

Selanjutnya Nur Azizah mengungkapkan bahwa ia ingin berkonsentrasi dalam penanggulangan kasus HIV-AIDS.

"Kasus HIV-AIDS makin banyak jumlahnya. Saya ingin mendirikan rumah rehabilitasi HIV, AIDS, dan LGBT," ucap istri dari mantan Walikota Depok 2 periode ini.

Terkait penyerapan Aspirasi Nur Azizah mengatakan bahwa saat ini hanya PKS yang memiliki hari khusus untuk menerima aspirasi dan kini ia juga memiliki rumah aspirasi di Kota Bekasi.

"Saya punya rumah aspirasi dan kantor di Kemang Sari, Jatibening. Senin sampai Kamis berkantor di DPR, Jumat sampai Ahad di kantor daerah pemilihan. Rencananya pekan 1 dan 3 di Depok serta 2 dan 4 di Bekasi. Kantor itu juga boleh untuk kegiatan dakwah seperti pengajian," ucap Nur Azizah.

Dalam kesempatan tersebut Nur Azizah juga memperkenalkan dua orang yang akan membantunya selama menjadi wakil rakyat, yakni Ida Nyoman Heru Siswoyo yang akan menjadi Koordinator Daerah Pemilihan (Kordapil) Kota Depok dan Riyana Widiyawati untuk Kordapil Kota Bekasi.

Saya punya rumah aspirasi dan kantor di Kemang Sari, Jatibening. Senin sampai Kamis berkantor di DPR, Jumat sampai Ahad di kantor daerah pemilihan. Rencananya pekan 1 dan 3 di Depok serta 2 dan 4 di Bekasi. Kantor itu juga boleh untuk kegiatan dakwah seperti pengajian

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI / Dapil Jabar VI

HNW Dorong Peningkatan Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Saya minta Kemensos segera rampungkan data warga disabel agar mereka bisa mengakses program pemerintah dan semakin terlibat dalam proses pembangunan

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta (29/12) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid meminta semua pihak untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas.

Pemerintah baik pusat maupun daerah bersama dengan DPR harus mendorong infrastruktur fisik dan sosial yang ramah disabilitas sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

"Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengubah cara pandang negara melihat disabilitas, dari charity-based menjadi pemberdayaan. Namun, implementasinya masih harus dikawal bersama", disampaikan Hidayat pada Kunjungan dan serap aspirasi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Jakarta di Kompleks YPAC, Jakarta (20/12).

Dalam kunjungan tersebut, Hidayat mendapatkan beberapa masukan dari komunitas penyandang disabilitas.

Di antara masukan tersebut adalah penyandang disabilitas masih kesulitan mengakses kesehatan karena infrastruktur di lokasi pelayanan kesehatan tidak ramah disabilitas, kesulitan mengakses transportasi publik di beberapa lokasi karena ketiadaan rambu untuk tunarungu, tangga yang curam, dan tidak adanya toilet khusus disabilitas.

Komunitas disabilitas yang bergerak di bidang pendidikan juga mengalami kendala dalam hal penempatan guru PNS yang tidak di tempat asalnya. Padahal, keterikatan antara guru dan murid di sekolah disabilitas jauh lebih kuat dibandingkan pada sekolah umum. Pendirian SLB Negeri di tiap Kecamatan di Jakarta juga dinilai bisa mematikan SLB eksisting yang selama ini telah berdiri.

Hidayat berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak terkait, sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI.

"Saya akan mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan pihak terkait, misal terkait kesehatan dan pendidikan dengan rekan-rekan di komisi IX dan X, dan terkait SLB negeri dengan Pemprov DKI sesuai dengan dapil saya", ujarnya.

Sebagaimana diketahui, issue leader terkait disabilitas adalah Kementerian Sosial, sebagai mitra dari Komisi VIII.

Hidayat meminta Kemensos untuk segera menyelesaikan pendataan masyarakat penyandang disabilitas, karena saat ini sistem Kemensos baru mendata 185.000 dari sekitar 20 juta warga disabel.

"Saya minta Kemensos segera rampungkan data warga disabel agar mereka bisa mengakses program pemerintah dan semakin terlibat dalam proses pembangunan", tegasnya.

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Atas nama keluarga besar Fraksi PKS DPR RI
Turut berduka atas berpulanngya
ke rahmatullah Wakil Ketua MUI Pusat

Prof. Dr., Lc., M.Ag
KH. YUNAHAR ILYAS

wafat pada Kamis 2 Januari 2020
di RS Sardjito Yogyakarta

Beliau adalah orang baik yang
selalu berpihak kepada kebaikan.
Semoga beliau mendapatkan
tempat terbaik di
JannahNya. Amin

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Iuran BPJS Tetap Naik

Mufida: Jika Jeritan Rakyat dan DPR Tak Didengar, Siapa Harus Tegur BPJS?

Ini untuk kedua kalinya pemerintah mengingkari hasil rapat dengan DPR tentang kenaikan iuran BPJS ini. Tentu saja ini sangat memprihatinkan karena pemerintah tidak punya komitmen yang kuat untuk mengurangi beban masyarakat terutama peserta kelas III PBPU dan BP ini dengan tetap menaikan iuran BPJS nya dari Rp. 25.500 menjadi Rp. 42.000",

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta (03/01) -- Memasuki awal tahun 2020, ditengah berbagai berita tentang bencana banjir dibeberapa wilayah, Kenaikan iuran BPJS Kesehatan resmi mulai diberlakukan sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2019.

Kenaikan ini berlaku untuk semua kelas dan klasifikasi peserta tanpa terkecuali yang tentu saja cukup memberatkan bagi peserta BPJS Mandiri.

Peserta kelas 1 dan 2 mengalami kenaikan lebih dari 100% dari iuran semula. Sementara peserta kelas 3 mandiri naik sebesar 65% yang akan dialami oleh peserta dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Kedua kelompok ini sebetulnya berada dalam kondisi yang cukup rentan miskin dan selama ini sangat berat untuk memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS.

"Kenaikan iuran BPJS yang mulai diberlakukan ini sangat mengecewakan, karena Pemerintah mengabaikan keputusan yang sudah dibuat bersama dengan DPR," demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati hari ini disela kunjungan ke Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta.

Mufida mengatakan bahwa Pemerintah yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, DJSN dan BPJS Kesehatan telah melakukan rapat maraton bersama dengan Komisi IX sampai dini hari sebanyak 2 kali yaitu pada 7 November 2019 dan 12 Desember 2019.

"Rapat dilakukan untuk mencari solusi bagaimana kenaikan iuran yang cukup besar ini tidak dilakukan, setidaknya bagi peserta kelas III dari PBPU dan BP karena akan cukup memberatkan ditengah situasi ekonomi yang masih lesu" ungkap Mufida.

Menurut Mufida, sejak rapat gabungan tanggal 2/9/2019, Komisi IX tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan terutama untuk peserta kelas III PBPU dan BP.

"Bahkan dalam Rapat tanggal 12/12 sudah ada kesepakatan untuk mengambil alternatif kedua diantara 3 alternatif yang diusulakan oleh kementrian kesehatan untuk mengatasi keberatan kenaikan iuran untuk kelas 3 peserta PBPU dan BP," tambah Mufida.

Alternatif yang disepekati, kata Mufida, saat itu adalah alternatif 2 bahwa manajemen BPJS akan memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta PBI yang diproyeksikan pada tahun mendatang akan ada profit akibat kenaikan iuran JKN berdasarkan Perpres No. 75/2019.

"Profit inilah yang akan digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta PBPU dan BP kelas III. Dengan kata lain, dalam kesepakatan ini tidak ada kenaikan iuran yang akan dibebankan kepada peserta PBPU dan BP kelas III", papar Mufida.

Namun Mufida menyesalkan bahwa pada kenyataannya, kenaikan yang mulai diberlakukan, akan dibebankan pada semua peserta BPJS mulai 2020.

"Keputusan ini berarti Pemerintah mengingkari kesepakatan, bahkan yang diusulkan sendiri oleh Menteri Kesehatan dan disetujui BPJS Kesehatan saat rapat tanggal 12/12/2019 lalu", pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi Fraksipks.id

BPJS Ingkar Janji dengan Menaikan Iuran, Kado Pahit Rezim untuk Rakyat

Kenaikan iuran BPJS adalah bukti pemerintah tidak mendengar jeritan hati rakyat. Katanya kerja untuk rakyat, tapi kok menyengsarakan rakyat. Rezim zalim, katanya pro rakyat tapi mencekik rakyat, Padahal Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, sudah menghitung bahwa surplus yang didapatkan dari kenaikan premi kelas I, II, dan PBI sangat cukup bila digunakan untuk mensubsidi peserta PBPU dan BP yang kesulitan membayar

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta (03/01) --- Anggota DPR RI Netty Prasetiyani, turut berduka atas ujian di tahun yang baru ini. Sebut saja banjir, longsor, dan bencana alam lainnya yg terjadi di Jabodetabek, Bandung Barat, bahkan Lebak Banten.

Namun, selain bencana alam di atas, Netty juga turut berduka di awal tahun ini dengan dilaksanakannya kebijakan Perpres 75 tahun 2019 tentang kenaikan premi BPJS untuk semua kelas.

"Belum kering air mata saya mendengar jeritan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan di dapil saat reses kemarin, ternyata mata hati rezim pemerintah telah mati, dengan tetap bersikukuh pada keputusan menaikkan premi dan mengabaikan kesepakatan antara Pemerintah dengan Komisi IX DPR RI saat Raker tanggal 12 Desember 2019 silam tentang subsisdi yang diberikan pemerintah untuk peserta PBPU dan BP kelas III", ungkap Netty.

Hal ini terungkap setelah Netty, selaku wakil ketua FPKS, mengkonfirmasi pihak BPJS terkait implementasi kesepakatan rapat marathon tanggal 6-7 November dan tanggal 11-12 Desember yang berakhir dini hari membahas kenaikan premi BPJS kesehatan.

Pemerintah berdalih tetap menaikkan premi semua kelas dikarenakan harus patuh pada regulasi Perpres 75/2019 dan tidak bisa bertindak melampaui kewenangan.

"Kenaikan iuran BPJS adalah bukti pemerintah tidak mendengar jeritan hati rakyat. Katanya kerja untuk rakyat, tapi kok menyengsarakan rakyat. Rezim zalim, katanya pro rakyat tapi mencekik rakyat," ujar Netty setelah mendengar dalih Pemerintah.

Padahal Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, sudah menghitung bahwa surplus yang didapatkan dari kenaikan premi kelas I, II, dan PBI sangat cukup bila digunakan untuk mensubsidi peserta PBPU dan BP yang kesulitan membayar.

"Benar-benar kado pahit untuk rakyat. Entah lakon drama apalagi yang mau dimainkan pemerintah untuk menyengsarakan rakyat", terang Netty.

Terkait langkah selanjutnya, Netty mengatakan, "Saya akan koordinasi dan konsolidasi, baik internal poksi maupun Komisi IX, untuk segera dilaksanakannya rapat gabungan Komisi IX dengan Kementerian lain terkait guna mempertanyakan hal tersebut. Selain itu saya akan membuat Hotline Service pengaduan warga di dapil yang dikeluarkan secara sepihak dari kepesertaan PBI", pungkas Netty mengakhiri.

Reses, Fikri Sampaikan Produk Legislasi Komisi X DPR RI

Beberapa produk legislasi selama dirinya menjabat di Komisi X DPR RI. Diantaranya adalah disahkannya beberapa Undang-Undang (UU) seperti UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, dan yang terakhir UU Nonor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif.

Tegal (02/01) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menggelar reses di beberapa titik di Dapil Jawa Tengah IX. Di Kota Tegal, reses digelar di Aula Azzurofah, Jalan Kauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, dihadiri 110 peserta, Senin 30/12/2019.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah Ketua DPD PKS Kota Tegal, Amiruddin, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, juga segenap struktur Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Tegal.

Dalam kesempatan tersebut selain menyampaikan fungsi anggota legislatif, Fikri Faqih juga kembali menginformasikan beberapa kementerian yang menjadi mitra Komisi X, diantaranya adalah Kemenristek Dikti, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemendikbud, Kemenpora, dan Perpustakaan Nasional.

"Karena masih mendapatkan amanah di komisi yang sama, maka tinggal melanjutkan apa yang selama ini sudah terjalin," kata Fikri.

Fikri juga menyampaikan beberapa produk legislasi selama dirinya menjabat di Komisi X DPR RI. Diantaranya adalah disahkannya beberapa Undang-Undang (UU) seperti UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, dan yang terakhir UU Nonor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif.

"Melalui regulasi yang telah dihasilkan, pemerintah sudah serius membuat payung hukum baik aspek pendidikan, literasi, kebudayaan, pariwisata, maupun ekonomi kreatif," jelas Fikri, politisi PKS yang berangkat ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM didampingi Ketua DPD PKS Kota Tegal, Amiruddin dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman reses di reses di Aula Azzurofah Kota Tegal (Dok: Istimewa)

Sakinah Aljufri Terima Kunjungan Bupati Bahas Potensi Wisata Kabupaten Sigi

"Kami hanya diskusi ringan terkait pemerintahan, isu-isu lokal dan bagaimana cara membangun aset wisata yang berada di Sigi yang sempat terbengkalai pasca gempa 28 September 2018 lalu, serta membicarakan pemanfaatan potensi wisata yang perlu menjadi perhatian, seperti potensi wisata air panas bora, paralayang matamtimali, danau lindu serta wisata religius di desa Kalukubula dan Dolo agar lebih baik kedepannya

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

Palu (01/01) --- Sakinah Aljufri Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS menerima kunjungan silaturahmi dari Bupati Sigi Moh. Irwan. Kegiatan silaturahmi dilaksanakan di kediaman Sakinah kompleks Alkhairaat, Senin, 30/12/2019.

Kegiatan silaturahim ini dilakukan untuk membangun komunikasi dan kemitraan untuk peningkatan pembangunan di kabupaten Sigi.

"Acara silaturahmi ini biasa saja, tidak lain hanya untuk mempererat komunikasi dengan tokoh perempuan Alkharaat yang terpilih sebagai wakil rakyat Sulteng di DPR RI dari dapil Sulteng, hal ini dilakukan pertama kali ," ujar Sakinah di kompleks Alkhairaat.

Dalam kegiatan ini Bupati Sigi Moh. Irwan Lapata beserta rombongan disambut langsung oleh Sakinah Aljufri dan tampak hadir juga Anggota DPRD Sigi dari PKS dalam pertemuan ini.

Adanya sinergi antara semua stakeholder pemangku kebijakan, akan semakin mudah dalam membangun dan mengembangkan kabupaten Sigi.

"Kami hanya diskusi ringan terkait pemerintahan, isu-isu lokal dan bagaimana cara membangun aset wisata yang berada di Sigi yang sempat terbengkalai pasca gempa 28 September 2018 lalu, serta membicarakan pemanfaatan potensi wisata yang perlu menjadi perhatian, seperti potensi wisata air panas bora, paralayang matamtimali, danau lindu serta wisata religius di desa Kalukubula dan Dolo agar lebih baik kedepannya," ungkap Irwan.

Dalam pertemuan ini Sakinah juga mengungkapkan perlunya pemanfaatan lahan tidur akibat gempa, agar dapat dimanfaatkan untuk menanam jenis tanaman Hortikultura.

Ekonomi Melambat, Masyarakat Perlu Tingkatkan Imunitas Ekonomi

Masyarakat menghadapi masa yang tidak mudah dimana ekonomi mengalami perlambatan. Dibarengi dengan kenaikan bahan-bahan pokok, BBM, jalan tol, dan tarif listrik. Tapi kita harus bertahan, karena ada atau tidak ada uang kita tetap butuh makan, anak-anak harus sekolah dan kebutuhan lain harus tetap terpenuhi

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag. M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (31/12) -- Memasuki tahun baru 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi perhatian khusus Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati.

Dalam wawancara dengan Radio MNC Trijaya FM Jakarta, Senin, 30/12/2019, Anis mengatakan berbagai upaya harus dilakukan, untuk membuat kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih baik.

"Menghadapi situasi ekonomi yang terus melambat, kita perlu meningkatkan imunitas ekonomi dalam diri kita agar imbas krisis tidak terlalu kuat kepada kita," ujar Anis.

Dalam rangka media visit ini, Anis menjelaskan tentang situasi ekonomi dalam negeri yang terus melambat.

Menurutnya masyarakat menghadapi masa yang tidak mudah dimana ekonomi mengalami perlambatan. Dibarengi dengan kenaikan bahan-bahan pokok, BBM, jalan tol, dan tarif listrik.

"Tapi kita harus bertahan, karena ada atau tidak ada uang kita tetap butuh makan, anak-anak harus sekolah dan kebutuhan lain harus tetap terpenuhi," katanya.

Anis kemudian mengupas khusus tentang ekonomi keluarga dan berpesan untuk para ibu.

"Sebagai ibu rumah tangga, kita harus mempersiapkan segala kondisi yang tidak menentu. Ketidakpastian ekonomi yang hampir resesi terjadi hampir di seluruh dunia. Tapi jika imunitas dalam diri kita kuat tidak akan berimbas pada keluarga dan negara kita" jelasnya.

Untuk membangun imunitas tersebut, Anis memberikan tips berupa langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai persiapan menghadapi ketidakpastian ekonomi ini.

Diantara langkah yang perlu dilakukan kata Anis, pertama yakni Mengalokasikan dana darurat. "Dana darurat ini sangat penting, berapapun jumlah uang dimiliki. Dalam masa ketidakpastian, segala kemungkinan bisa terjadi. Misalnya beberapa usaha tutup, terjadi PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan", ungkapnya.

Anis menambahkan Idealnya setiap keluarga bisa menabung dan menyimpan dana senilai kebutuhan hidup untuk 3 sampai 6 bulan. Dana ini dapat dipakai saat pemasukan keluarga terhenti. Ini yang dimaksud dengan dana darurat.

"Yang kedua dengan menabung dalam bentuk emas. Karena menabung dalam bentuk emas tidak beresiko dan nilainya tidak akan turun," pungkasnya.

Saat ini, menurut Anis mulai banyak lembaga yang menawarkan investasi dalam bentuk emas. Emas tahan terhadap inflasi dan ANTAM perusahaan yang mengeluarkan emas dalam berbagai ukuran, mulai dari satu gram.

Ketiga, lanjut Anis, jika ingin investasi, pilihlah bentuk investasi yang sesuai dengan kondisi keuangan keluarga. Jangan sekali-kali tergiur dengan iming-iming yang menawarkan imbal hasil tinggi, karena resikonya juga tinggi.

"Diantara investasi yang aman, menyimpan dalam bentuk SUKUK (semacam surat utang negara). Bagi hasil sukuk memang tidak besar, tetapi relatif lebih aman", tuturnya.

Anis mengatakan jika punya hutang, usahakan membuat planning untuk melunasinya. Karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tiba-tiba nilai uang naik maka hutang kita juga menjadi tinggi. "Jangan sampai terlilit hutang, tapi upayakan penyelesaiannya", imbuhnya.

Selengkapnya kunjungi fraksipks.id

Junaidi Auly: Tantangan 2020 Sangat Kompleks, Pemerintah Dituntut Bekerja Keras

Terlepas dari gejolak yang ada, pemerintah sudah seharusnya memiliki langkah-langkah strategis untuk mendorong ekonomi bisa tumbuh lebih kencang. Kalau kita lihat, peranan perdagangan internasional pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 18-20%, sisanya peranan ekonomi domestik. Jadi, ruang untuk bergerak lebih cepat sebetulnya tersedia,

Ir. H. JUNAIDI AULY, MM.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS

Jakarta (31/12) -- Pemerintah masih belum optimal dalam rangka mengelola turbulensi ekonomi global, sehingga di tahun 2019 beberapa aspek masih gagal mencapai target.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, belum mampu beranjak dari 5%-an. Padahal, perlu level yang lebih tinggi agar persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan lebih maksimal.

Jika tidak beranjak dari 5%, Indonesia berpotensi masuk pada kelompok negara-negara middle income trap.

Junaidi Auly Anggota DPR RI Fraksi PKS menjelaskan bahwa turbulensi ekonomi global telah memukul berbagai sektor di Indonesia, mulai dari ekspor, investasi, hingga bermuara pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Dikhawatirkan kondisi ini masih berlanjut hingga tahun depan. Berbagai lembaga dunia juga melihat belum kondusifnya ekonomi global. Apalagi perkembangan politik di Amerika Serikat tentunya dapat mempengaruhi pasar dan urgensi untuk diantisipasi," jelas Junaidi.

Junadi menambahkan terlepas dari gejolak yang ada, pemerintah sudah seharusnya memiliki langkah-langkah strategis untuk mendorong ekonomi bisa tumbuh lebih kencang.

"Kalau kita lihat, peranan perdagangan internasional pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 18-20%, sisanya peranan ekonomi domestik. Jadi, ruang untuk bergerak lebih cepat sebetulnya tersedia," tandasnya.

Pada bagian lain, Junaidi menyoroti ekonomi terus bergantung pada konsumsi rumah tangga, sehingga nilai tambahnya tidak signifikan bagi ekonomi nasional.

"Pemerintah perlu menggenjot investasi langsung agar kualitas pertumbuhan membaik. Kita akan sulit tumbuh, jika hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga", tutupnya.

OLEH-OLEH
DAPIL

Reses itu sesuatu

Dari Bekasi ke Majalengka,
Lewat Cipali keluar Kertajati...
Serap Aspirasi paparkan Kinerja,
Tulus melayani bahagia dalam hati..

Gedong Gincu kuning memerah,
Manis buahnya menggugah selera..
Reses itu bangkitkan gairah,
Senyum menyapa sambungkan rasa

NHZ
Majalengka, 29/12/19

Dukung Program Penghijauan, Johan Rosihan dan Bupati KSB Tanam Pohon

Kegiatan ini adalah bentuk dukungan kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Mengingat kondisi hutan pulau Sumbawa saat ini sudah sangat kritis. Makanya kita mengajak masyarakat mari menjaga hutan dan merehabilitasinya kembali. rangkaian dalam acara kemah bhakti nusantara kali ini yakni Outbont, wawasan kebangsaan, materi kepartaian dan penanaman pohon

H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI / Dapil NTB I

Taliwang (30/12) --- Untuk mendukung program NTB hijau yang dicanangkan oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah, anggota DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) W. Musyafirin melakukan penanaman 1000 pohon di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Penanaman pohon kayu dan buah dilakukan bersama seluruh peserta Kemah Bhakti Nusantara yang di gelar oleh DPD PKS KSB.

"Pak Bupati serta Pimpinan DPRD dan Ketua DPD PKS KSB pada acara penanaman pohon sebagai rangkaian acara kemah bhakti nusantara yang digelar oleh DPD PKS KSB," ungkap H. Johan Rosihan anggota komisi IV DPR RI kepada media ini 29/12/2019).

Menurutnya ada 1000 pohon yakni terdiri dari 400 pohon buah dan sisanya adalah pohon kayu.

"Kegiatan ini adalah bentuk dukungan kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Mengingat kondisi hutan pulau Sumbawa saat ini sudah sangat kritis. Makanya kita mengajak masyarakat mari menjaga hutan dan merehabilitasinya kembali," tandasnya.

Lanjut Johan, rangkaian dalam acara kemah bhakti nusantara kali ini yakni Outbont, wawasan kebangsaan, materi kepartaian dan penanaman pohon," tuturnya.

Sedangkan kegiatan ini tambah Johan, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa PKS ingin selalu memberikan karya terbaik buat bangsa serta kokohnya berkhidmat untuk rakyat.

"Kegiatan ini juga melatih disiplin dan kesiapsiagaan kader PKS dan melaksanakan pengkhidmatan kepada rakyat. Karena, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah," tutupnya.

Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat, Pastikan Rakyat yang Diuntungkan

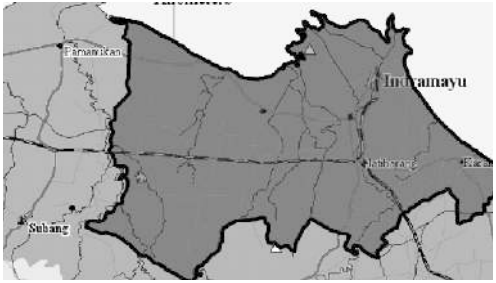

Indramayu (03/01) --- Anggota DPR RI Netty Prasetiyani, merespon rencana pembentukan atau pemekaran Kabupaten Indramayu Barat yang mulai mengemuka akhir-akhir ini.

Menurut Netty pembentukan dan pemekaran Kabupaten Indramayu Barat harus memperhatikan beberapa terutama mekanisme ganti rugi untuk warga.

"PKS mendukung dan mendorong segera direalisasikannya rencana pemekaran Kabupaten Indramayu Barat guna memberi kemudahan pelayanan pada masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota," ungkap Netty Prasetiyani.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berharap, rencana pemekaran yang sudah mendapat persetujuan dari pemda dan DPRD Kab. Indramayu ini memberi angin segar, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah Indramayu Barat.

"Orientasinya harus kepentingan rakyat, bukan kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Rakyat harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan adanya pemekaran. PKS harus mengawal dan memastikan itu," kata Netty yang merupakan anggota DPR RI, mewakili pemilih di Dapil Jabar 8.

Dalam sambutan pembukaan acara Rakorda DPD PKS Kab. Indramayu di Hotel Wiwi Perkasa, Netty mengapresiasi kehadiran Plt. Bupati Kab. Indramayu Taufik Hidayat, Ketua DPRD Syaifudin dan perwakilan partai Nasdem, PAN, Hanura, PKB, Gerindra dan Demokrat.

"Warna-warni pelangi hari ini menjadi bukti bahwa PKS siap berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan guna memajukan Indramayu," pungkasnya.

Saat ditanya soal arah dukungan PKS dalam Pilbup Indramayu 2020, Netty mengatakan bahwa PKS sudah memiliki pakem dan arahan yang jelas terkait koalisi pilkada.

"PKS mendukung calon yang memiliki kapasitas dan integritas serta bersedia melibatkan PKS dalam

> Orientasinya harus kepentingan rakyat, bukan kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Rakyat harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan adanya pemekaran. PKS harus mengawal dan memastikan itu
>
> **Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**
> Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VIII

Masuk Masa Reses

Bukhori Hadiri Ngobrol Bareng Anggota DPRD Provinsi dan Kota

Ada 8 mitra komisi, kementerian sosial, kementerian agama, kementerian perempuan dan perlindungan anak, komisi perlindungan anak Indonesia, badan wakaf Indonesia, BAZNAS, badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB), badan pengelolaan keuangan haji (BPKH)",

KH. BUCHORI, Lc., M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Jawa Tengah

Salatiga (29/12) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf menghadiri acara ngobrol Bareng bersama anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota Salatiga dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat Salatiga dan kader simpatisan PKS kota salatiga, Selasa, (24/12/2019).

Dalam acara tersebut Bukhori menggunakan baju lurik pakaian khas suku Jawa dan menggunakan penutup kepala berupa belangkon.

Acara ngobrol bareng sebagai ajang silaturahmi untuk saling menguatkan ukhuwah dan mendengarkan aspirasi masyarakat kota Salatiga terkait permasalahan yang ada.

Bukhori menjelaskan capaian-capain kerja selama masa sidang Pertama.

"Salah satu capaian PKS, berhasil memasukkan RUU perlindungan tokoh agama dan simbol agamayang merupakan janji-janji politik selama kampanye", ungkap Bukhori.

Bukhori mengungkapkan bahwa dirinya diamanahkan oleh PKS untuk masuk ke komisi VIII DPR RI.

"Ada 8 mitra komisi, kementerian sosial, kementerian agama, kementerian perempuan dan perlindungan anak, komisi perlindungan anak Indonesia, badan wakaf Indonesia, BAZNAS, badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB), badan pengelolaan keuangan haji (BPKH)", tutup Bukhori.

Hadiri Peresmian Gedung Bersejarah

Nurhasan Zaidi: Kita Bangkitkan Semangat Persatuan Ummat Islam

Kita akan bangkitkan kembali heroisme dan spirit wasathiyah islam dari sini. Karena sejarah telah mencatat bahwa gedung ini telah melahirkan tokoh besar bangsa dan pahlawan nasional",

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I
Anggota Komisi VIII DPR RI / Dapl Jabar IX

Majalengka (01/01) --- Anggota legislatif Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa barat IX, Nurhasan Zaidi, menghadiri peresmian Gedung bersejarah Balai Permusyawaratan Muslimin (Bapermin), di Majalengka, Jum'at (27/12/2019).

Gedung yang didirikan pada tahun 1953 dan merupakan saksi sejarah pusat pergerakan ormas Persatuan Ummat Islam (PUI) di Indonesia ini kembali diresmikan setelah di lakukan renovasi.

Beberapa tokoh yang hadir dalam peresmian tersebut yakni Ahmad Heryawan sebagai Ketua Majelis Syuro PUI yang sekaligus memimpin peresmian dan prosesi pengguntingan pita, Bupati Majalengka Karna Sobahi, Ketua Umum DPP PUI Nazar Haris dan perwakilaan pimpinan Wilayah dan Daerah PUI serta tokoh-tokoh agama se-Kabupaten Majalengka.

Nurhasan Zaidi dalam sambutannya mengatakan Peresmian gedung baru Bapermin yang bersejarah ini diharapkan menjadi momen untuk kembali melahirkan semangat perjuangan generasi penerus Majalengka.

"Kita akan bangkitkan kembali heroisme dan spirit wasathiyah islam dari sini. Karena sejarah telah mencatat bahwa gedung ini telah melahirkan tokoh besar bangsa dan pahlawan nasional", pungkasnya.

Sejumlah anggota BPUPKI, Abdul Halim, putra asli Majalengka yang telah mendirikan ormas PUI bersama Ahmad Sanusi dan Syamsudin dengan misi Ishlahnya demi membangun dan mempersatukan ummat dan bangsa", lanjut Nurhasan.

Sesuai kesepakatan antara pihak terkait, gedung yang baru diresmikan tersebut akan digunakan kembali menjadi pusat dakwah dan pembinaan keumatan, hal itu disepakati untuk mempertahankan dan memperkuat kaderisasi ditempat asalnya bagi generasi muda dan penerus bangsa, khususnya kader Persatuan Ummat Islam.

"Peresmian dan rencana revitalisasi gedung ini juga membawa kita pada dua dimensi sekaligus. Dimensi indahnya sejarah heroik masa lalu dan dimensi masa depan yang penuh tantangan, hal itu karena keberadaan Kabupaten Majalengka yang saat ini terus berbenah diri dengan segala aspek pembangunan dari berbagai sektor untuk menunjang keberadaan Bandara Internasional Kertajati yang telah di resmikan. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dengan baik.," ungkapnya.

Sementara itu Dalam sambutannya Bupati Majalengka mengatakan keberadaan gedung bersejarah Bapermin yang sudah direnovasi itu, diharapkan bisa jadi tempat untuk meningkatkan perkembangan da'wah sekaligus syiar Islam di Kabupaten Majalengka, ditengah tantangan globalisasi dan keberadaan Kabupaten Majalengka yang saat ini terus berbenah diri dengan segala aspek pembangunan dari berbagai sektor untuk menunjang keberadaan Bandara Internasional Kertajati.

Anggota Dewan PKS Siap Advokasi Warga Korban Gusuran Bandara Seotta

InsyaAllah kami akan perjuangkan masalah ini hingga selesai. Kami prihatin melihat kondisi warga yang tadinya punya tempat tinggal sekarang harus ngontrak karena belum mendapat ganti rugi

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

Tangerang (01/01) --- Menindaklanjuti hasil kunjungan reses ke lokasi penggusuran rumah warga Kelurahan Kosambi, Kota Tangerang, untuk perluasan Bandara Soekarno-Hatta, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto akan membentuk tim advokasi PKS bagi masyarakat.

Rencana anggotanya terdiri dari unsur pengacara lembaga bantuan hukum PKS, anggota DPRD Kota Tangerang, anggota DPRD Provinsi Banten, dan unsur DPR RI dan diharapkan bekerja awal Januari 2020.

"Target kami persoalan penggusuran rumah warga di sekitar bandara bisa selesai, baik dengan musyawarah ataupun melalui jalur hukum. Kami ingin masalah ini segera selesai dan warga bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya," ujar Mulyanto di sela kegiatan reses DPR-RI, Senin (30/12).

Tim PKS akan berkoordinasi dan mendukung kordinator warga yang sudah lebih dulu ada menangani masalah ini ke pengadilan dan kepolisian.

"Tugas kita disini adalah mencari jalan penyelesaian terbaik bagi semua pihak. Kita akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait agar persoalannya terang benderang," seru anggota dewan dari daerah pemilihan Tangerang Raya ini.

Mulyanto meminta masyarakat untuk sabar mengikuti proses penyelesaian sengketa ini dengan baik. Sebab proses hukum atau proses musyawarah yang dilakukan melalui jalur pengadilan butuh waktu.

"Kami juga berharap masalah ini cepat selesai. Tapi yang namanya proses penyelesaian sengketa di pengadilan butuh waktu. Kami berharap masyarakat sabar dan turut mendoakan agar masalah ini bisa selesai dengan baik," kata Mulyanto.

Sebelumnya Mulyanto melakukan kunjungan reses ke lokasi penggusuran pemukiman warga di kelurahan Kosambi, Kota Tangerang, Senin (24/12).

Dalam kunjungan tersebut Mulyanto bertemu dengan puluhan warga yang mengadu masalah penggusuran tersebut dan meminta anggota DPR-RI Fraksi PKS tersebut untuk dapat membantu. Sebab selama masalah ini belum selesai banyak warga yang belum punya tempat tinggal pengganti. Saat ini warga banyak yang mengontrak di wilayah sekitar sambil menunggu masalah ini selesai.

"InsyaAllah kami akan perjuangkan masalah ini hingga selesai. Kami prihatin melihat kondisi warga yang tadinya punya tempat tinggal sekarang harus ngontrak karena belum mendapat ganti rugi," tegas Mulyanto.

PKS Siap Berkoalisi di Pilkada di Daerah Asalkan Sesuai Hasil Survei

Saat ini, PKS Kaltara mengadakan Rakorwil untuk menata dan berkonsolidasi dalam menatap kemenanangan di Pilkada Kaltara 2020. Baik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati se-Kaltara. Kita berharap PKS ada diposisi sebagai pemenang dan tidak ingin diluar dari situ. PKS ingin bersama membangun Kaltara lebih baik lagi

Habib ABOE BAKAR ALHABSYI,
Anggota Fraksi PKS DPR RI / Ketua Wilda Kalimantan DPP PKS

JAKARTA – Ketua DPP PKS Bidang Dakwah Wilayah Kalimantan Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan Pilkada di Kalimantan Utara partainya siap berkoalisi dengan partai manapun. Apa termasuk partai koalisi Jokowi?

"Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Partai Keadilan Sejahtera di Kaltara membuka diri untuk berkoalisi dengan partai manapun," kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Ahad (29/12/2019).

Habib Aboe mengungkapkan, PKS di pusat sebagai oposisi tapi didaerah bebas berkoalisi dengan siapapun di Pilkada Kaltara. Baik itu PDIP, Golkar, Nasdem maupun partai lainnya selama berpihak dan bekerjasama memakai dan memanfaatkan secara maksimal peran PKS.

Saat ini, lanjutnya, PKS Kaltara mengadakan Rakorwil untuk menata dan berkonsolidasi dalam menatap kemenangan di Pilkada Kaltara 2020. Baik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati se-Kaltara.

"Kita berharap PKS ada diposisi sebagai pemenang dan tidak ingin diluar dari situ. PKS ingin bersama membangun Kaltara lebih baik lagi," terang Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini

"Yang pasti balon diusung PKS berpihak dengan PKS. Dari 3 balon yang mendaftar penjaringan di PKS semua bagus yakni Jusuf SK, Irianto Lambrie dan H. Udin Hianggio," sambungnya.

Ia menjelaskan, prinsip PKS balon yang mendaftar semuanya diterima. Tinggal lihat kesepakatan yang dilakukan antara PKS dan Balon tersebut.

Ia mengaku, dalam memutuskan siapa balon akan diusung, PKS tetap ilmiah dengan melihat hasil survei. Selanjutnya melihat visi dan misi serta keberpihakannya kepada PKS.

"PKS berusaha ada kadernya ikut dipinang maju di pilkada Kaltara sebagai Wakil. Tetapi jika tidak ada kadernya, PKS tetap berusaha mengusung yang terbaik," ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.

"Pasti kita berusaha selama musyawarah dan mufakat bisa diterima kita senang serta bahagia kalau ada kader PKS ikut dipinang. Kalau tidak kita tetap berkomitmen akan mengusung yang terbaik," tutup Habib Aboe. (HMS)

PROFIL **Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag.**

Pondasi Bangsa Bernama KELUARGA

Allah memberikan kebaikan kepada seluruh hambaNya yang bersyukur. Siapa yang pandai berterima kasih kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Dilipatgandakan kebaikan-kebaikannya. Dijadikan hari-harinya penuh manfaat dan kesuksesan InsyaAllah.

Mari kita isi akhir pekan ini dengan aktivitas positif, bercengkrama dengan #keluargaPKS. Seperti biasa setiap sabtu kita akan menyapa Anggota Legislatif dari Fraksi PKS DPR RI, kali ini dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng) Hj. Sakinah Al Jufri, S.Ag. Beliau lahir di Solo, 2 Juni 1964.

Sakinah merupakan wanita muslimah pertama untuk pemilihan langsung asal Sulteng yang duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI.

Sakinah mempunyai 3 putra dan 1 putri. Dukungan dan restu suami Haidar Aljufri menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bagi Sakinah masuk ke parlemen merupakan bagian dari dakwah, sebuah jalan yang telah ditempuhnya sejak lama dan kinipun duduk sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Wanita Islam Alkhairaat (PP.WIA) ormas Islam yang besar di Indonesia Timur.

Sakinah memiliki hobi sejumlah kebiasaan unik seperti memasak,bersih-bersih rumah dan jalan bersama keluarga.

Dalam kesibukan menjadi anggota DPR, sakinah tidak pernah putus komunikasi dengan buah hati dan keluarga.

Pesan Ibu Sakinah untuk keluarga Indonesia : "Keluarga adalah bangunan terkecil dari negeri ini,maka kuatkan pondasinya untuk kekuatan negeri ini"

Untuk mengetahui semua kegiatan parlemen Ibu Sakinah dapat mengikuti social media:

Facebook
Sakinah Aljufri
Instagram
@sakinahaljufri

> Keluarga adalah bangunan terkecil dari negeri ini, maka kuatkan pondasinya untuk kekuatan negeri ini

Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI

fraksi.pks.id

Website
fraksi.pks.id

Instagram
fraksipksdprri

Twitter
@fraksipksdprri

Facebook
Fraksi PKS DPR RI

Youtube
PKSTV DPR RI